

EFISIENSI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS UNTUK PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN WONOSOBO: PENDEKATAN *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS*

EFFICIENCY OF SPECIAL ALLOCATION FUND FOR SECONDARY EDUCATION OF WONOSOBO REGENCY: A DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Azalia Setya Andini¹, Yanuar Pribadi^{2*}

^{1,2}Politeknik Keuangan Negara STAN;

Email: ¹4301190181_azalia@pknstan.ac.id, ²yanuar.pribadi@pknstan.ac.id

Dikirim 29 Juni 2022, Direvisi 12 Juli 2022, Disetujui 29 Juli 2022

Abstrak: Salah satu bentuk implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia ialah transfer ke daerah berupa Dana Perimbangan. Transfer ke daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain berupa kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus terhadap efisiensi pendidikan menengah di level SMA/SMK di Kabupaten Wonosobo menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis*. DEA merupakan metode yang dapat menganalisis tingkat efisiensi dari beberapa DMU berdasarkan input dan output yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari sekolah menengah penerima Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Wonosobo tahun 2020-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sekolah yang belum efisien. Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menyusun skema penilaian kinerja yang tepat dan mekanisme *reward* and *punishment* untuk meningkatkan efisiensi pendidikan menengah sehingga pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Wonosobo terutama di bidang pendidikan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Kata kunci: Dana Perimbangan, Data Envelopment Analysis, Efisiensi, Pendidikan.

Abstract: *Implementation of fiscal decentralization in Indonesia is formed in an intergovernmental transfer or Balance Fund. It aims to improve public services, including the quality of education. This study aims to analyze the role of the Balance Fund especially Special Allocation Fund on the efficiency of secondary education at the high school level in Wonosobo Regency using a Data Envelopment Analysis. DEA is a method to analyze the efficiency of several DMUs based on specified inputs and outputs. This research uses data from senior/vocational high schools which are got the Special Allocation Fund in Wonosobo Regency in 2020-2021. The results indicate that there are DMUs that are not efficient yet. The local government ought to develop a performance indicator and a reward and punishment mechanism to improve the efficiency of secondary education so that the utilization of the Special Allocation Fund in education at Wonosobo Regency can achieve the specified targets.*

Keywords: *Data Envelopment Analysis, Education, Efficiency, Intergovernmental Transfer*

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan ekonomi di sebuah negara. Namun wewenang pemerintah pusat memiliki kontrol yang terbatas, sehingga terjadi pemecahan wewenang pusat yang dilimpahkan ke daerah, yang biasa disebut dengan desentralisasi. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu konsep dalam desentralisasi ialah desentralisasi fiskal yakni kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengeluaran, hingga pertanggungjawaban. Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia diterapkan

melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal ini berperan sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah (Christia & Ispriyarso, 2019). Dana Perimbangan diberikan ke pemerintah daerah agar supaya dapat memenuhi kebutuhan aktivitas dan program desentralisasi fiskal. Dana Perimbangan selalu meningkat hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 menurun akibat pandemi Covid-19. Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, pada tahun 2020, Dana Perimbangan yang diberikan sebesar 653 triliun rupiah dan meningkat pada tahun 2021 yaitu 688 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, alokasi Dana Perimbangan yang ditransfer ke Kabupaten Wonosobo sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 berkisar di atas 1 triliun rupiah. Sementara itu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler yang diberikan untuk Kabupaten Wonosobo juga cenderung meningkat dengan signifikan dari tahun 2020 ke 2021. Peningkatan tersebut seharusnya disertai juga dengan peningkatan terhadap kualitas pendidikan pada tahun 2021 apabila DAK Fisik tersebut dimanfaatkan dengan baik. Hal ini cukup beralasan mengingat bahwa pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Selain itu DAK juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah (Harahap, 2011).

Data yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Wonosobo masih tertinggal daripada daerah lain di Jawa Tengah. Di tahun 2021 masih banyak anak yang belum mengenyam pendidikan dengan layak karena disebabkan faktor geografis. Dari sisi IPM, nilai IPM

Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 adalah 68,22. Padahal pada level provinsi, IPM Jawa Tengah sudah mencapai angka 71,87 pada tahun 2020. Meskipun keberhasilan pelayanan publik di sektor pendidikan juga sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing daerah (Saifuddin, 2019a), namun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana perimbangan, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang bersifat umum dan general dalam konteks efisiensi penggunaan dana tersebut.

Berangkat dari hal-hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk melihat efisiensi Dana Perimbangan dalam bentuk DAK untuk sektor pendidikan yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Wonosobo. Pada lingkup daerah, pengelolaan ekonomi daerah berada pada kewenangan pemerintah daerah sejalan dengan prinsip desentralisasi ekonomi dan fiskal (Pribadi & Nurbiyanto, 2021). Regulasi yang mengatur mengenai desentralisasi telah menetapkan bahwa pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah juga disertai dengan sumber pendanaan kepada daerah terkait. Namun, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar pelayanan minimal dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Dana perimbangan merupakan bagian dari transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022). Bagian dari transfer ke daerah ini antara lain berupa

DAK yang digunakan untuk membiayai kegiatan atau program tertentu untuk membiayai layanan operasional publik antara lain di bidang pendidikan.

Menurut PMK 198 Tahun 2021, DAK dibedakan menjadi DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk ditransfer kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Afirmasi, dan DAK Fisik lain.

Dalam perencanaan dan penganggaran DAK Fisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN mengajukan kebutuhan yang direncanakan akan didanai oleh DAK Fisik kepada Menteri Keuangan selaku BUN. Kebutuhan DAK Fisik tersebut disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pemerintah, prioritas nasional, dan target DAK Fisik. Serta perkiraan kebutuhan pendanaan atas rancangan bidang DAK Fisik yang bersifat wajib dialokasikan yaitu dalam rangka pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah melalui proses perencanaan, penganggaran, pengalokasian, dan persiapan teknis, kemudian dilakukan proses penyaliran DAK Fisik ke daerah. Kepala Pengguna Anggaran atau KPA menyusun Rencana Kerja Anggaran BUN DAK Fisik sesuai Peraturan Presiden setiap tahunnya. Kemudian RKA BUN DAK Fisik tersebut di reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kemudian akan disusun Rencana Dana Pengeluaran BUN dengan berdasar hasil reviu RKA BUN DAK Fisik. Setelah disampaikan dan

ditelaah oleh Direktorat Jenderal Anggaran, kemudian disahkan DIPA induk dan DIPA petikan untuk DAK Fisik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana. Penyaluran DAK Fisik dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan peraturan perundangan.

Penatausahaan DAK Fisik saat ini harus dilaporkan melalui Online Monitoring SPAN atau OMSPAN. DAK Fisik terdiri dari 6 bidang DAK Fisik Reguler dan 12 bidang DAK Fisik Penugasan. Terdapat 2 bidang baru sebagai tambahan bidang DAK Fisik, yaitu bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Bidang Perdagangan (Pratama, 2019).

Berbeda dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang menjadi urusan daerah. DAK Nonfisik terbagi menjadi 7 macam, yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan, Dana Tunjangan Profesi guru Aparatur Sipil Negara Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah, dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya.

Perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait dengan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana atau IKD dan KAK kepada Kementerian Keuangan maksimal pada bulan Januari. Kemudian DJPK, Kemenkeu selaku PPA BUN membuat IKD DAK Nonfisik pada bulan Februari. IKD DAK Nonfisik harus memperhatikan arah kebijakan dan prioritas DAK Nonfisik, perkembangan dana transfer lainnya dan/atau DAK Nonfisik dalam tiga tahun terakhir, perkiraan kebutuhan belanja operasional dan/atau biaya per unit untuk masing-masing DAK Nonfisik, dan/atau pengalihan belanja kementerian negara/lembaga terkait yang merupakan urusan daerah. IKD DAK Nonfisik tersebut

kemudian akan di reviu, ditelaah, dan dijadikan pedoman pembuatan DIPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Setelah perencanaan, DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jenisnya. Untuk Dana BOS dan BOP pengalokasiannya sesuai jumlah peserta didik yang dikalikan jumlah biaya satuan per peserta didik.

Secara umum, efisiensi merupakan komponen penilaian kinerja melalui perbandingan antara keluaran yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan. Dengan demikian efisiensi bertujuan untuk memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh. Efisiensi diharapkan dapat meningkatkan kualitas atau kuantitas hasil yang ingin dicapai apabila menambah kinerja pada input, meskipun efisiensi tidak selalu dilakukan dengan penghematan sumber daya, tapi dapat dilakukan juga dengan memaksimalkan output yang dihasilkan (Rakhmawati, 2017).

Terdapat tiga jenis efisiensi yang dikemukakan dalam pengukuran efisiensi (Tuffahati et al., 2016). Efisiensi teknis yaitu mengukur tingkat efisiensi penggunaan teknologi sesuai dengan inputnya guna mencapai tingkatan output tertentu. Kemudian efisiensi alokasi yaitu mengukur efisiensi pengelolaan dalam mengalokasikan input yang akan digunakan untuk menghasilkan output sesuai dengan indikator yang dibutuhkan stakeholder. Dan yang terakhir adalah efisiensi biaya yaitu mengukur tingkat efisiensi apabila input yang dipilih menggunakan biaya yang paling minimal.

Efisiensi perlu dilakukan pengukuran untuk mengevaluasi kinerja input dan menilai daya saing dengan entitas lain. Untuk mengukur efisiensi terdapat tiga pendekatan pengukuran efisiensi yaitu pendekatan rasio, pendekatan regresi, dan pendekatan frontier (Muharam & Pusvitasari, 2007). Tulisan ini akan fokus pada analisis efisiensi antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan.

Efisiensi yang akan dibahas adalah efisiensi pendidikan pada jenjang menengah atas dan menengah kejuruan.

Input yang digunakan yaitu DAK dan jumlah tenaga pendidik. Sedangkan outputnya adalah jumlah siswa yang lulus, jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, dan akreditasi sekolah. Input tersebut akan dinilai apakah pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang paling minimal untuk mencapai tingkat output tertentu. Karena untuk efisiensi pendidikan itu sendiri, terdapat indikator-indikator lain yang belum bisa diukur secara rasional selain pada input dan output diatas.

Efisiensi pelayanan publik merupakan salah satu indikator penyediaan layanan yang baik. Salah satu cara menilai efisiensi pelayanan publik ialah melalui penilaian terhadap adanya peningkatan output atau dengan menekan penggunaan sumber daya atau input (Afonso et al., 2010). Pada sistem pelayanan yang sudah modern di era globalisasi saat ini, penyedia layanan publik dituntut untuk terus meningkatkan kinerja layanan seoptimal mungkin.

Dalam istilah ekonomi, efisiensi adalah rasio atau perbandingan usaha atau kerja yang berhasil dan seluruh kerja atau pengorbanan yang dikerahkan untuk mencapai hasil tersebut. Jadi, efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu organisasi dengan masukan (*input*) yang digunakan. Penentuan efisiensi yang digunakan pada sektor publik merupakan hal yang kompleks karena berbeda dengan sektor privat, sektor publik berorientasi untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial atau mencapai kesejahteraan publik (Mihaiu et al., 2010).

Dalam pelayanan publik, terdapat empat dimensi utama efisiensi yang terdiri atas *productive efficiency*, *allocative efficiency*, *distributive efficiency*, dan *dynamic efficiency* (Andrews & Entwistle, 2013). Dalam perkembangannya, penyedia layanan publik yang umum seperti pendidikan semakin bergeser menuju prinsip pengelolaan badan layanan umum. Yang memberikan ciri adanya prinsip efisiensi (dan produktivitas) sebagai karakteristik

khusus dari lembaga tersebut (Lukman, 2013).

Efisiensi merupakan konsep yang memberikan warna baru pada manajemen sektor publik. Sektor publik selama ini selalu diasosiasikan dengan pelayanan yang lambat dan tidak produktif. Oleh karena itu, efisiensi dapat berperan sebagai bagian yang krusial dalam pelayanan publik baik ketika menghadapi konteks persaingan dengan layanan yang sejenis ataupun dalam hal menciptakan inovasi baru.

Efisiensi selalu berpedoman pada konsep *pareto efficiency* yaitu konsep yang mengasumsikan keadaan penuh dan tidak memungkinkan untuk mengubah *resources* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan satu pihak (*better-off*) tanpa menimbulkan konsekuensi terhadap pihak lain (*worse-off*). Artinya, konsep pareto akan terbentuk ketika semua pihak yang terlibat sebagai pelaku ekonomi berada dalam kondisi yang optimal (Aditia & Waluyo, 2015).

Istilah efisiensi yang paling familiar dilakukan dengan mengukur rasio antara input dengan output yang dihasilkan. Konsep ini merupakan pengukuran efisiensi melalui penghitungan rasio efisiensi berupa input dan output (Ozcan, 2014). Efisiensi berarti meningkatkan output dari input yang ada atau meminimalkan input untuk menghasilkan output yang ada, dengan mempertahankan kualitas (Jackson, 2012). Penghitungan ini pada dasarnya menilai seberapa besar output yang dihasilkan dengan input yang sama atau menghasilkan sejumlah output tertentu dengan meminimalkan input. Sebagaimana disampaikan (Cahya, 2015), suatu kegiatan ekonomi dikatakan efisien secara teknik apabila menghasilkan output maksimal dengan sumber daya tertentu atau memproduksi sejumlah tertentu output menggunakan sumber daya yang minimal. Pada organisasi publik, permasalahan efisiensi adalah untuk mencari fungsi maksimum dari produksi dengan batasan belanja yang tetap. Masalah ini cocok dengan penerapan teknik statistik seperti DEA, yang mengukur titik optimal

kombinasi input dan output (Andrews & Entwistle, 2013).

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur efisiensi melalui pendekatan familiar yang bersifat non-parametrik. DEA digunakan untuk mengukur nilai efisiensi relatif dari sekumpulan variabel yang mempunyai masukan (input) dan keluaran (output) yang serupa. Objek penelitian yang dikaji melalui DEA disebut dengan *Decision-Making Unit* (DMU).

Terdapat dua jenis model DEA yakni *Constant Return to Scale* (CRS) dan *Variable Return to Scale* (VRS). Model CRS dipelopori oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes (sehingga disebut juga model CCR, sesuai inisial nama mereka) pada tahun 1978. Model ini mengemukakan bahwa perubahan secara linear pada tingkat input akan menyebabkan perubahan secara linear yang serupa pada tingkat output. Pada tahun 1984, Banker, Charnes, dan Cooper memperluas model CRS menjadi model *Variable Return to Scale* (VRS, atau juga disebut model BCC sesuai inisial nama mereka). Model VRS mengasumsikan bahwa semua unit yang diukur akan menghasilkan perubahan pada berbagai tingkat output dan adanya anggapan bahwa skala produksi dapat mempengaruhi efisiensi.

Setelah menetapkan DMU dan asumsi yang akan digunakan mengukur efisiensi melalui DEA, langkah selanjutnya adalah menetapkan komponen input dan output yang akan diukur. Pemilihan variabel input dan output merupakan tahap yang paling krusial dalam penilaian efisiensi menggunakan DEA (Yesilaydin, 2017). Keterkaitan antara jumlah DMU dengan input dan output yang digunakan sering ditetapkan berdasarkan aturan "rule of thumb", yaitu jumlah DMU diharapkan lebih banyak dibandingkan jumlah input dan output dan ukuran sampel seharusnya dua atau tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah keseluruhan input dan output. Asumsi dalam pemilihan sampel DMU dapat dipertimbangkan dari

banyaknya jumlah DMU tersebut. Pada umumnya, jumlah DMU tiga kali lebih besar dari total jumlah antara input dan output meskipun beberapa riset juga tidak menutup kemungkinan penggunaan sampel yang lebih sedikit.

Dalam metode DEA, objek penelitian dikenal dengan istilah Decision-Making Unit (DMU), dalam hal ini adalah satker BLU. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan DMU (Ramanathan, 2003). Faktor pertama adalah homogenitas. Unit-unit tersebut melakukan tugas (*task*) yang sama, dan memiliki tujuan (*objective*) yang sama. Input dan output yang mencirikan kinerja dari DMU harus identik, kecuali berbeda hanya intensitas dan jumlah/ukurannya (*magnitude*). Faktor kedua adalah jumlah DMU. Jumlah DMU yang dibandingkan tergantung dari tujuan penelitian serta jumlah unit homogen yang kinerjanya dapat dibandingkan. Semakin banyak DMU yang dibandingkan, maka kemungkinan untuk menemukan unit dengan kinerja terbaik akan semakin tinggi pula.

Penilaian efisiensi di bidang pendidikan di Indonesia telah dilakukan antara lain oleh (Apriyansyah et al., 2020) yang menyatakan bahwa efisiensi pendidikan sekolah menengah di Jawa Timur periode 2016-2019 cenderung menurun. Dari sudut pandang pihak yang mengalokasikan dana yaitu dinas pendidikan, pemerintah daerah dipandang sudah efisien (Fahrianta & Carolina, 2012), namun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sekolah menengah sebagai objek yang dinilai tingkat efisiensinya. Efisiensi pendidikan tingkat sekolah menengah juga dilakukan oleh (Isa, 2009) di Surakarta dan (Mulyati, 2018) di kota Semarang, dan menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan menengah di Jawa Tengah dipengaruhi oleh belum meratanya kualitas guru dan output hasil pendidikan antar sekolah. Di sisi lain, akreditasi sekolah juga berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan (Awaludin, 2017).

Efisiensi di bidang pendidikan umumnya diukur dari output hasil pendidikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan stakeholders (Rahman, 2017). Efisiensi di bidang pendidikan sangat penting mengingat kebutuhan anggaran untuk pendidikan tersebut umumnya sangat besar (Johnes et al., 2017). Selain itu, temuan dari (Saifuddin, 2019b) menyatakan bahwa peningkatan mutu pendidikan juga tergantung dari sinergi pemangku kebijakan, kualitas pendidik, serta infrastruktur penunjang pendidikan. Meskipun banyak hal yang berpengaruh terhadap efisiensi pendidikan menengah misalnya sosial ekonomi masyarakat (Minuci et al., 2019) namun pengukuran efisiensi di bidang pendidikan melibatkan hal yang sangat kompleks dan perlu memperhitungkan banyak aspek yang diukur (Kosor, 2013). Lebih jauh (Mandl et al., 2008) menyampaikan bahwa peningkatan efisiensi belanja publik merupakan hal yang krusial dalam menilai kinerja atau efisiensi di bidang pendidikan.

APBD di Kabupaten Wonosobo sebagian besar digunakan untuk belanja pada sektor publik. Dana Alokasi Khusus yang dapat disalurkan dalam bidang pendidikan yaitu DAK Nonfisik berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), serta Tunjangan Profesi Guru. Adapun pokok permasalahan terkait dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk penyediaan layanan pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, efisiensi pendidikan dalam hal ini di level menengah penting untuk dilakukan karena dapat digunakan untuk menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan yang tepat terkait alokasi dana di bidang pendidikan, sehingga diharapkan kualitas pendidikan di daerah tersebut dapat meningkat dan berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat di daerah tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis*. Metode DEA adalah sebuah metode non-parametrik untuk menghitung perbandingan rasio dari beberapa input sekaligus output tertentu (Johnes, 2006) DEA digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan mengukur tingkat efisiensi pada *Decision-Making Unit* atau DMU. DMU adalah entitas yang menggambarkan unit operasi yang antar entitas tersebut memiliki karakteristik yang sama. DMU perlu dibandingkan supaya dapat melakukan *benchmarking* tingkat efisiensi dengan menggunakan input dan output yang sama. Dengan menggunakan metode DEA, pengukuran efisiensi dapat menggunakan input dan output lebih dari satu. Selama terdapat indikator keterkaitan antara input dan output, beberapa input dan output bisa dijadikan untuk mengukur efisiensi. Keunggulan menggunakan metode DEA yaitu tidak memerlukan asumsi awal terkait spesifikasi fungsi relasi atau hubungan matematika antara input dan output karena menggunakan pendekatan nonparametrik. Jadi dalam DEA ini hanya menghitung efisiensi pada setiap DMU. Apabila hasil pengukuran berupa inefisiensi, maka dapat dianalisis dan diperhitungkan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan dari sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Wonosobo yang mendapatkan alokasi DAK pada tahun 2020 dan 2021. DMU yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah delapan sekolah SMA/SMK di Kabupaten Wonosobo. Input yang digunakan untuk analisis DEA berupa besaran DAK dan jumlah tenaga kependidikan. Sedangkan Output yang digunakan untuk analisis DEA terdiri atas akreditasi sekolah, jumlah lulusan, dan jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pendekatan yang digunakan untuk analisis DEA ialah pendekatan berbasis input. Secara matematis dapat disimbolkan dengan $\theta^* = \min \theta$, yang artinya θ^* adalah tingkat efisiensi yang akan dicapai dengan meminimalisir input atau $\min \theta$. Yang akan dirinci menggunakan algoritma sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} &\leq \theta x_{j_0} & i &= 1, 2, \dots, m; \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{rj} &\leq y_{r_0} & r &= 1, 2, \dots, s; \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j &= 1 & j &= 1, 2, \dots, n; \\ \lambda_j &\geq 0 \end{aligned}$$

Keterangan:

j = DMU unit ke-

x = input

y = output

i = input DMU ke-

r = output DMU ke-

Ketika input (x) dikalikan dengan sebuah variabel (λ) maka harus kurang dari atau sama dengan efisiensi dikali input setiap DMU. Sehingga input yang digunakan untuk pengukuran efisiensi sudah tidak dapat diturunkan kembali. kemudian saat output (y) dikalikan dengan variabel (λ) maka harus lebih besar atau sama dengan tingkat output yang akan dicari, yang artinya output tetap terjaga meskipun terdapat perubahan input. DMU dikatakan efisien apabila mencapai nilai 1.

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} + S_i^- &\leq \theta x_{j_0} & i &= 1, 2, \dots, m; \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{rj} - S_r^+ &\leq y_{r_0} & r &= 1, 2, \dots, s; \end{aligned}$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \quad j = 1, 2, \dots, n;$$

$$\lambda_j \geq 0$$

S_i^- adalah variabel yang dijumlahkan dengan input dan S_r^+ adalah suatu variabel yang dikurangkan dengan output. Artinya yaitu akan dicari suatu variabel untuk dibandingkan dengan input yang harus ditekan ataupun output yang akan dimaksimalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DMU yang digunakan dalam analisis efisiensi pendidikan menengah di Kabupaten Wonosobo ini sebanyak delapan DMU yaitu terdiri atas SMA/SMK yang mendapatkan alokasi DAK pendidikan. Input yang digunakan adalah besaran DAK tiap sekolah, dan jumlah tenaga kependidikan masing-masing sekolah, sedangkan output yang dijadikan dasar analisis DEA adalah akreditasi sekolah, jumlah lulusan tiap tahun, dan jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Guna memudahkan pemahaman dan pembacaan, hasil penelitian dideskripsikan terlebih dahulu, dilanjutkan bagian pembahasan.

Pada tahun 2020 terdapat 3 sekolah yang inefisien yaitu SMKN 1 Wonosobo, SMAN 1 Kretek, dan SMAN 1 Mojotengah. Sedangkan data hasil pengolahan efisiensi di tahun 2021 memperlihatkan bahwa terdapat 2 DMU yang inefisien yaitu SMAN 1 Kretek, dan SMAN 1 Mojotengah.

Tabel 1. Hasil Analisis Efisiensi SMA/SMK di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dan 2021

DMU	Nama Sekolah	2020	2021
1	SMA Negeri 1 Wonosobo	Efisien	Efisien
2	SMK Negeri 1 Wonosobo	Inefisien	Efisien
3	SMA Negeri 2 Wonosobo	Efisien	Efisien
4	SMK Negeri 2 Wonosobo	Efisien	Efisien
5	SMA Negeri 1 Kretek	Inefisien	Inefisien
6	SMA Negeri 1 Mojotengah	Inefisien	Inefisien
7	SMA Negeri 1 Watumalang	Efisien	Efisien
8	SMA Negeri 1 Selomerto	Efisien	Efisien

Sumber: data, diolah penulis

A. Efisiensi Pendidikan Menengah di Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa pada setiap DMU yang dianalisis pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil yang berbeda-beda dengan skor efisiensi yang berbeda pula. Dengan input berupa Dana Alokasi Khusus dan tenaga pendidik, terdapat beberapa DMU yang konsisten memiliki tingkat efisiensi setiap tahun yaitu SMA Negeri 1 Wonosobo, SMA Negeri 2 Wonosobo, SMK Negeri 2 Wonosobo, SMA Negeri 1 Watumalang, dan SMA Negeri 1 Selomerto.

Terdapat 1 DMU yang mengalami peningkatan efisiensi di tahun 2021 yaitu SMK Negeri 1 Wonosobo setelah sebelumnya di tahun 2020 masuk kategori inefisien. Sisanya, yaitu SMA Negeri 1 Kretek dan SMA Negeri 1 Mojotengah memiliki nilai efisiensi di bawah 1 sehingga masuk kategori inefisien selama 2 tahun berturut-turut.

SMA Negeri 1 Wonosobo dinyatakan efisien yakni memiliki skor efisiensi sebesar satu pada tahun 2020 dan 2021. Karena menurut data yang dikumpulkan output yang dihasilkan SMA Negeri 1 Wonosobo paling optimal dibandingkan dengan sekolah lain. Output yang paling berbeda secara signifikan dengan sekolah lain adalah alumni yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada tahun 2020 sebanyak 88 persen dari jumlah siswa yang lulus melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Artinya sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Wonosobo memiliki motivasi dan potensi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang

lebih tinggi. Dengan DAK Nonfisik sebesar 1,43 miliar rupiah yang disalurkan, SMA Negeri 1 Wonosobo menghadirkan guru dan karyawan yang mampu membimbing para siswa hingga menjadi Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas. Namun pada tahun 2021 dengan DAK Nonfisik sebesar 1,49 miliar rupiah siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sebesar 72 persen dari seluruh siswa yang lulus. SMA Negeri 1 tetap dinilai efisien padahal input berupa DAK Nonfisik meningkat namun jumlah lulusan menurun karena input berupa tenaga pendidik berkurang dan jumlah lulusan meningkat. Artinya SMA Negeri 1 menerima lebih banyak siswa dengan tenaga pendidik yang berkurang. Dengan kata lain pihak sekolah juga sudah menyelenggarakan pendidikan yang layak sehingga bermanfaat bagi siswanya.

SMK Negeri 1 Wonosobo pada tahun 2020 masih dinilai belum efisien karena output berupa siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya 17 persen dari jumlah siswa yang lulus. DAK Nonfisik SMK Negeri 1 Wonosobo merupakan DAK Nonfisik terbesar dari sekolah lain yang menjadi objek penelitian dalam karya tulis ini. DAK Nonfisik yang disalurkan tahun 2020 sebesar 2,78 miliar rupiah dan meningkat menjadi 2,83 miliar rupiah di tahun 2021. Dengan demikian terjadi peningkatan pada output yaitu jumlah siswa yang lulus dan yang melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak 18 persen. Sehingga pada tahun 2021 skor efisiensi SMK Negeri 1 Wonosobo bernilai satu, yang artinya SMK Negeri 1 Wonosobo berhasil mengoptimalkan output yang dihasilkan. Untuk sekolah kejuruan indikator yang diukur juga adalah jumlah lulusan yang melanjutkan untuk bekerja. Jadi terdapat kemungkinan sebagian besar siswa yang lulus dari SMK Negeri 1 Wonosobo memilih mencari pekerjaan.

Tabel 2. Perhitungan Efisiensi SMA/SMK di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No	DMU	INPUT			OUTPUT		Lambda	Score Efisiensi
		DAK	TP	AK	ALU	AL-KLH		
1	SMA Negeri 1 Wonosobo	1,44	82	100	306	270	0	1,000
2	SMK Negeri 1 Wonosobo	2,78	119	100	474	85	0	0,9279712
3	SMA Negeri 2 Wonosobo	1,56	71	100	348	210	0,508475	1,000
4	SMK Negeri 2 Wonosobo	2,43	117	100	495	74	0	1,000
5	SMA Negeri 1 Kretek	0,89	50	100	170	40	0	0,983
6	SMA Negeri 1 Mojotengah	1,12	70	100	232	40	0	0,991
7	SMA Negeri 1 Watumalang	0,63	42	100	112	15	0,491525	1,000
8	SMA Negeri 1 Selomerto	0,31	24	85	47	20	7,22E-16	1,000

Ket: DAK = Dana Alokasi Khusus, TP= Tenaga Pendidik, AK= Akreditasi Sekolah, ALU= Jumlah Lulusan/Alumni per tahun, AL-KLH= Jumlah alumni yang meneruskan kuliah

sumber: data (diolah)

SMA Negeri 2 Wonosobo juga dinilai efisien pada tahun 2020 dan 2021. Karena SMA Negeri 2 Wonosobo merupakan DMU yang menghasilkan output berupa lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi terbanyak kedua setelah SMA Negeri 1 Wonosobo. DAK Nonfisik sebesar 1,56 miliar rupiah pada tahun 2020 dan 1,57 miliar rupiah dapat menghasilkan output berupa lulusan terbanyak untuk Sekolah Menengah Atas. Namun dengan input berupa tenaga pendidik yang lebih sedikit daripada SMA Negeri 1 Wonosobo. Dan lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi tahun 2020 sebanyak 60 persen dan tahun 2021 adalah 45 persen dari total jumlah lulusan.

SMK Negeri 2 Wonosobo yang dianalisis dengan metode DEA mendapat skor efisiensi sebesar satu. Hal ini disebabkan karena input berupa DAK Nonfisik pada tahun 2020 sebesar 2,43 miliar rupiah yang lebih kecil dari SMK Negeri 1 Wonosobo namun dapat menghasilkan output berupa siswa yang lulus lebih banyak. Kemudian pada tahun 2021 SMK Negeri 2 Wonosobo mengurangi input berupa tenaga pendidik sehingga tetap efisien. Untuk siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi pada tahun 2020 sebesar 14 persen dan pada tahun 2021 sebanyak 4 persen. Hal ini dikarenakan lulusan dari SMK Negeri 2 Wonosobo didominasi oleh lulusan yang melanjutkan untuk bekerja dan membuka

usaha. Apabila indikator lulusan yang sudah bekerja juga diperhitungkan maka output dari SMK Negeri 2 Wonosobo akan lebih optimal.

SMA Negeri 1 Kretek dinilai tidak efisien dalam menyelenggarakan pendidikan dilihat dari penggunaan DAK Nonfisik. DAK Nonfisik yang disalurkan pada tahun 2020 sebesar 0,89 miliar rupiah dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,95 miliar rupiah. Jumlah lulusan juga meningkat namun yang melanjutkan ke pendidikan tinggi hanya 25 persen hingga tahun 2021. Hal ini dinilai output yang dihasilkan masih belum optimal. Berdasarkan perhitungan slack pada metode DEA, SMA Negeri 1 Kretek perlu mengurangi input berupa tenaga pendidik dan DAK Nonfisik. Pada tahun 2020 DAK Nonfisik dapat dikurangi sebesar 12 juta rupiah dan tahun 2021 sebesar 71 juta rupiah. Tenaga pendidik sebagai input juga dapat ditekan pada tahun 2021 dengan mengurangi enam tenaga pendidik. Jadi untuk mengoptimalkan output, SMA Negeri 1 Kretek harus menambah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak minimal dua lulusan pada tahun 2020.

SMA Negeri 1 Mojotengah juga masih belum efisien dalam menyelenggarakan pendidikan. Hal ini dikarenakan DAK Nonfisik di tahun 2020 yang berjumlah 1,12 miliar rupiah dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 1,20 miliar rupiah justru menurunkan output berupa jumlah siswa yang lulus. Meskipun persentase siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi meningkat dari 17 persen menjadi 26 persen, hal ini masih dinilai inefisien akibat input berupa tenaga pendidik dan DAK Nonfisik masih bisa ditekan. Berdasarkan perhitungan slack, SMA Negeri 1 Mojotengah dapat mengoptimalkan output dengan menambah jumlah siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak 12 pada tahun 2020 dan 74 pada tahun 2021.

SMA Negeri 1 Watumalang dalam analisis ini dinilai sudah efisien karena

dengan DAK sebesar 0,63 miliar rupiah pada tahun 2020 dan 0,65 miliar rupiah pada tahun 2021 dapat meningkatkan output berupa jumlah siswa yang lulus. Selain itu siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga meningkat dari 13 persen menjadi 15 persen. SMA Negeri 1 Watumalang yang berada jauh dari pusat kota termasuk efisien karena tenaga pendidik sebagai input dinilai tidak terlalu banyak.

Berdasarkan analisis DEA, SMA Negeri 1 Selomerto dinilai sudah efisien karena dengan input berupa DAK Nonfisik yang paling kecil yaitu sebesar 0,31 miliar rupiah pada tahun 2020 dan 0,40 miliar pada tahun 2021. Meskipun akreditasi SMA Negeri 1 Selomerto bernilai B, namun presentase siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi mencapai 42 persen. Angka tersebut lebih besar dari SMA Negeri 1 Watumalang yang sudah terakreditasi A. Artinya SMA Negeri 1 Selomerto dinilai dapat menggunakan DAK Nonfisik untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mencetak output yang sama dengan atau minimal yang diperhitungkan dengan metode DEA.

Tabel 3. Perhitungan Efisiensi SMA/SMK di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

No	DMU	INPUT		OUTPUT			Lambda	Score Efisiensi
		DAK	TP	AK	ALU	AL-KLH		
1	SMA Negeri 1 Wonosobo	1,49	78	100	322	233	0	1,000
2	SMK Negeri 1 Wonosobo	2,83	118	100	540	99	0	1,000
3	SMA Negeri 2 Wonosobo	1,58	69	100	342	157	0,357143	1,000
4	SMK Negeri 2 Wonosobo	2,42	113	100	494	20	0	1,000
5	SMA Negeri 1 Kretek	0,95	50	100	195	50	0	0,944
6	SMA Negeri 1 Mojotengah	1,20	63	100	225	60	0	0,820
7	SMA Negeri 1 Watumalang	0,65	42	100	160	25	0,642857	1,000
8	SMA Negeri 1 Selomerto	0,40	24	85	77	22	0	1,000

Ket: DAK = Dana Alokasi Khusus, TP= Tenaga Pendidik, AK= Akreditasi Sekolah, ALU= Jumlah Lulusan/Alumni per tahun, AL-KLH= Jumlah alumni yang meneruskan kuliah

sumber: data (diolah)

B. Penggunaan Dana Alokasi Khusus Untuk Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo

Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan sangat menunjang proses belajar mengajar. Karena pemerintah menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dari pihak sekolah kepada orang tua atau wali murid. Seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 bahwa komite sekolah dilarang meminta pungutan pada peserta didik ataupun orang tua/wali peserta didik. Dengan demikian Dana Alokasi Khusus dinilai sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Dana Alokasi Khusus disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke masing-masing sekolah. Dengan syarat, setiap sekolah harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sebagai syarat pengajuan administrasi. Untuk penganggaran dapat dilakukan dengan cara pengelola keuangan atau bendahara BOS dan BOP harus terlebih dahulu menentukan alokasi per jenis belanja. Jumlah alokasi jenis belanja harus sama dengan jumlah dana yang diterima setiap tahap. Kemudian RKAS diserahkan ke Cabang Dinas Pendidikan dan disalurkan ke pemerintah pusat. Selain itu sekolah juga harus menyelesaikan Laporan Keuangan tahun anggaran lalu.

Mulai tahun 2019, Dinas Pendidikan mengembangkan aplikasi yang terintegrasi yaitu Siperkasa atau Sistem Informasi Permohonan Kerjasama. Siperkasa digunakan untuk menginput data RKAS yang dilakukan oleh setiap sekolah. Kemudian pada tahun 2022 terdapat aplikasi baru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang lebih terintegrasi dan bernama ARKAS atau Aplikasi Rencana dan Anggaran Kegiatan Sekolah. Setelah masing-masing sekolah telah memenuhi persyaratan, Dana Alokasi Khusus akan ditransfer melalui rekening bank atas nama sekolah.

Penggunaan DAK Fisik digunakan untuk menunjang pembangunan di sekolah yang infrastruktur dan fasilitasnya dinilai masih kurang. Di Kabupaten Wonosobo, untuk jenjang pendidikan menengah hanya beberapa sekolah saja yang mendapatkan transfer DAK Fisik. Sedangkan DAK Nonfisik digunakan untuk membantu biaya operasional sekolah. Penggunaan DAK Nonfisik hampir sama di setiap sekolah yang membedakan adalah kegiatan yang terdapat pada masing-masing sekolah. Apabila kegiatan disetiap sekolah berbeda, maka kebutuhan untuk menunjang kegiatan tersebut juga berbeda. Pada semua sekolah di Kabupaten Wonosobo yang menjadi objek penelitian, DAK Nonfisik berupa Dana BOS mekanisme penggunaannya berpedoman pada juknis. Penggunaan Dana BOS juga harus dilakukan sesuai tahapan pencairan dana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama digunakan untuk membiayai program Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB, program kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan lomba akademik dan non akademik, ujian, pengembangan profesi guru, langganan daya listrik dan internet, serta program kegiatan akademik hingga peserta didik lulus. Penggunaan Dana BOS juga digunakan untuk membeli kebutuhan barang dan jasa seperti Alat Tulis Kantor dan perlengkapan kegiatan sekolah. Kemudian digunakan untuk belanja aset tetap seperti pembelian buku wajib. Untuk belanja modal digunakan untuk pembelian laptop, komputer, *printer*, LCD, dan perlengkapan perpustakaan. Berbeda dengan Sekolah Menengah Kejuruan, terdapat perbedaan penggunaan Dana BOS yaitu untuk belanja alat dan bahan untuk praktik pembelajaran. Dana yang disalurkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan juga lebih banyak daripada Sekolah Menengah Atas. Karena pada Sekolah Menengah Kejuruan terdapat praktik kerja yang membutuhkan alat-alat praktik dan jasa praktikan untuk menunjang kegiatan pembelajaran tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, DAK merupakan komponen yang sangat penting karena menjadi sumber dana terbesar yang digunakan untuk belanja modal untuk membiayai kegiatan sekolah karena peserta didik tidak dikenakan pungutan apapun. Hal ini dapat membawa manfaat yaitu membantu meringankan beban finansial orang tua/wali peserta didik serta memperlancar jalannya pendidikan.

C. Hambatan dan Kendala Penggunaan DAK

Dalam penggunaan DAK, ternyata masih terdapat beberapa kendala yang masih dialami oleh masing-masing sekolah. Kendala dalam penyaluran, penggunaan, dan pelaporan DAK dapat memengaruhi ataupun menghambat proses pelaksanaan pendidikan. Kendala yang banyak dialami oleh sekolah yaitu keterlambatan pencairan dana pada awal tahun atau pencairan dana tahap satu. Akibatnya, terdapat kegiatan sekolah yang seharusnya menggunakan dana dari tahap satu menjadi tertunda ataupun sekolah harus mencari sumber pendanaan untuk menutupi kebutuhan sekolah di awal tahun.

Selain itu, meskipun penggunaan DAK termasuk fleksibel namun sekarang sudah dibatasi sesuai dengan peraturan dan mengikuti kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Pengalokasian penggunaan DAK juga sudah disusun dan dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah namun pada realitanya masih terdapat beberapa belanja yang tidak dapat terpenuhi menggunakan DAK. Sehingga sekolah tetap harus menekan belanja yang bukan untuk kegiatan prioritas sekolah atau merealokasi anggaran dalam rangka *refocussing*.

Selain kendala penggunaan DAK, terdapat kendala dalam penyelenggaraan pendidikan pada saat pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020 dan 2021. Dengan adanya sistem pembelajaran jarak jauh pada tahun 2020, proses pembelajaran menjadi

terganggu. Banyak kegiatan yang tidak terlaksana, membuat sekolah mengalokasikan anggaran pada kegiatan lainnya. Akibatnya peserta didik perlu beradaptasi dengan suasana pembelajaran di rumah dengan keterbatasan yang ada. Selain itu kegiatan ekstrakurikuler juga tidak berjalan seperti biasanya. Sehingga siswa juga sempat terhambat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan DAK di setiap sekolah pada Kabupaten Wonosobo sebagian besar dinilai sudah efisien. Efisien ini bersifat relatif berdasarkan delapan DMU yang dianalisis. Masih terdapat tiga sekolah yang belum efisien dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus pada tahun 2020, yaitu SMK Negeri 1 Wonosobo, SMA Negeri 1 Kretek, dan SMA Negeri 1 Mojotengah. Sedangkan pada tahun 2021 yang masih dinilai inefisien adalah SMA Negeri 1 Kretek dan SMA Negeri 1 Mojotengah. Hal tersebut dikarenakan masih adanya input yang masih terlalu banyak yang seharusnya bisa ditekan serta output yang belum mencapai output DMU yang menjadi *benchmark* dalam analisis DEA.

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dituliskan pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran DAK sangat penting untuk penyelenggaraan Pendidikan di daerah khususnya pada Kabupaten Wonosobo. DAK digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah dan merupakan satu-satunya sumber yang pendapatan sekolah yang paling besar karena pihak sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada seluruh siswa.

DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat

harus dipastikan seefisien mungkin. Berdasarkan analisis efisiensi, dengan adanya sekolah yang masih belum efisien, maka diperlukan sebuah kerangka evaluasi kinerja bagi setiap sekolah di Kabupaten Wonosobo sebagai alat pertanggungjawaban penggunaan DAK yang lebih nyata. Sekolah yang masih belum efisien dapat melakukan benchmarking kepada sekolah yang telah beroperasi secara efisien secara kontinyu. Penerapan skema atau mekanisme untuk memberikan penghargaan berupa insentif tambahan DAK jika sekolah dinilai efisien dan/atau pengurangan DAK di tahun berikutnya jika sekolah tersebut dinilai tidak efisien. Penerapan mekanisme evaluasi kinerja seperti di atas dapat memacu sekolah untuk memperbaiki kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta efisiensi penggunaan DAK untuk penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonosobo.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, & Waluyo, B. (2015). Agensifikasi (Agencification) dan Efisiensi: Analisis pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit. *Info Artha*, 1, 1–23.
- Afonso, A., Schuknecht, L., & Tanzi, V. (2010). Public sector efficiency: Evidence for new EU member states and emerging markets. *Applied Economics*, 42(17), 2147–2164. <https://doi.org/10.1080/00036840701765460>
- Andrews, R., & Entwistle, T. (2013). Four Faces of Public Service Efficiency: What, how, when and for whom to produce. *Public Management Review*, 15(2), 246–264. <https://doi.org/10.1080/14719037.2012.725760>
- Apriyansyah, B., Hanoum, S., Prihananto, P., & Mukaromah, S. L. (2020). Efficiency Evaluation of Primary and Secondary Education Sector Performance in East Java Using Data Envelopment Analysis. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 13(2), 151–163.
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>
- Cahya, A. R. K. (2015). Efisiensi Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Data Envelopment Analysis. *Economics Development Analysis Journal*, 4(3), 223–232.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Fahrianta, R. Y., & Carolina, V. (2012). Analisis efisiensi anggaran belanja dinas pendidikan kabupaten kapuas. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 57–72.
- Harahap, R. U. (2011). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kab./kota propinsi sumatera utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 47–58.
- Isa, M. (2009). Efisiensi Teknis Pendidikan Di Kota Surakarta: Aplikasi Data Envelopment Analysis (Dea). *BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 13, 14–22.
- Jackson, P. (2012). Value for Money and International Development: Deconstructing Some Myths To Promote More Constructive Discussion. In *OECD Development Co-operation* (Vol. 2012, Issue May, p. 7). <https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49652541.pdf>

- Johnes, J. (2006). Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency in higher education. *Economics of Education Review*, 25(3), 273–288. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2005.02.005>
- Johnes, J., Portela, M., & Thanassoulis, E. (2017). Efficiency in education. *Journal of the Operational Research Society*, 68(4), 331–338. <https://doi.org/10.1057/s41274-016-0109-z>
- Kosor, M. M. (2013). Efficiency Measurement in Higher Education: Concepts, Methods and Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 106, 1031–1038. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.117>
- Lukman, M. (2013). *Badan layanan umum: dari birokrasi menuju korporasi*. Bumi Aksara.
- Mandl, U., Dierx, A., & Ilzkovitz, F. (2008). The effectiveness and efficiency of public spending. In *Economic Papers EU*. <https://doi.org/10.2765/22776>
- Mihaiu, D. M., Opreana, A., & Cristescu, M. P. (2010). Efficiency, effectiveness and performance of the public sector. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, 13(4), 132–147.
- Minuci, E., Ferreira Neto, A. B., & Hall, J. (2019). A data envelopment analysis of West Virginia school districts. *Heliyon*, 5(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01990>
- Muharam, H., & Pusvitasari, R. (2007). Analisis perbandingan efisiensi bank syariah di Indonesia dengan metode data envelopment analysis (Periode tahun 2005). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(3), 80–166.
- Mulyati, S. (2018). *Economics Development Analysis Journal*
- Analisis Efisiensi Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 89–97. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Ozcan, Y. A. (2014). Performance measurement using data envelopment analysis (DEA). In *Health care benchmarking and performance evaluation* (pp. 15–47). Springer.
- Pratama, M. Y. (2019). *Mengenal DAK Dan Kebijakan Baru DAK Non Fisik 2019*. Artikel & Opini. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mengenal-dak-dan-kebijakan-baru-dak-non-fisik-2019/>
- Pribadi, Y., & Nurbiyanto, N. (2021). Pengukuran Daya Saing Kabupaten Lampung Tengah: Metode Location Quotient Dan Shift-Share Analysis. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 9(03), 299–310. <https://doi.org/10.35450/jip.v9i03.264>
- Rahman, A. (2017). Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Eklektika*, 5(2), 87–102.
- Rakhmawati, T. (2017). *Pengukuran Efisiensi di Instansi Pemerintah dengan Metode Data Envelopment Analysis DEA untuk Mendukung Reformasi Birokrasi*. LIPI Press. <https://e-service.lipipress.lipi.go.id/press/catalog/book/123>
- Ramanathan, R. (2003). *An introduction to data envelopment analysis: a tool for performance measurement*. Sage.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 1 (2022).

<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>

Saifuddin, R. (2019a). Evaluasi Sekolah Gratis SMA/SMK di Kota Bandarlampung. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 05(02), 98–112.

Saifuddin, R. (2019b). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sinergi Kebijakan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. *Inovasi Pembangunan –Jurnal Kelitbangan*, 7(3), 253–264.
<http://journalbalitbangdalampung.org>

Tuffahati, H., Mardian, S., & Suprpto, E. (2016). Pengukuran Efisiensi Asuransi Syariah Dengan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–23.
<https://doi.org/10.35836/jakis.v4i1.27>

Yesilaydin, G. (2017). Health efficiency measurement in Turkey by using data

envelopment analysis: A systematic review. *Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi*, (1-2-3), 49–69.

Halaman Kosong